



Efek Heroism dalam Komunikasi Politik: Konstruksi Citra Aktor Politik Melalui Insiden Berisiko Tinggi di Wilayah Konflik Kepentingan

Nabila Zahia Putri Syahriar^{1*}, Atika Puspita Marzaman²

¹⁻²Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Korespondensi penulis: zahiaaan@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the effect of heroism in political communication as a strategy for constructing the image of political actors through high-risk incidents in areas of conflicting interests within the framework of international security studies. Political heroism is utilized to build legitimacy, strengthen political influence, and shape public perceptions of state and non-state actors amid conflicts, wars, and security crises. Using a qualitative approach through literature review and political communication analysis, this research explores how mass media and public diplomacy contribute to the formation of narratives of courage, leadership, and sacrifice attached to certain political figures. The findings indicate that the construction of a heroic image can enhance political support and legitimize power at both domestic and international levels, particularly in issues related to national security and geopolitical conflicts. However, the strategy of heroism also has the potential to manipulate public opinion, intensify excessive nationalism, and legitimize controversial political actions within international relations. Therefore, heroism in political communication functions as a strategic instrument that significantly influences the dynamics of global security and political stability.*

Keywords: *Conflict Of Interests; Heroism; International Security; Political Actor Image; Political Communication.*

Abstrak. Penelitian ini membahas efek heroism dalam komunikasi politik sebagai strategi konstruksi citra aktor politik melalui insiden berisiko tinggi di wilayah konflik kepentingan dalam perspektif keamanan hubungan internasional. Fenomena heroisme politik digunakan untuk membangun legitimasi, memperkuat pengaruh politik, serta membentuk persepsi publik terhadap kepemimpinan aktor negara maupun non-negara di tengah situasi konflik, perang, dan krisis keamanan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis komunikasi politik, penelitian ini mengkaji bagaimana media massa dan diplomasi publik berperan dalam membentuk narasi keberanian, kepemimpinan, dan pengorbanan yang melekat pada figur politik tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi citra heroik mampu meningkatkan dukungan politik dan legitimasi kekuasaan, baik pada tingkat domestik maupun internasional, terutama dalam isu keamanan nasional dan konflik geopolitik. Namun, strategi heroisme juga berpotensi menciptakan manipulasi opini publik, memperkuat nasionalisme berlebihan, serta melegitimasi tindakan politik yang kontroversial dalam hubungan internasional. Dengan demikian, heroism dalam komunikasi politik menjadi instrumen strategis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika keamanan dan stabilitas politik global.

Kata kunci: Citra Aktor Politik; Heroism; Keamanan Hubungan Internasional; Komunikasi Politik; Konflik Kepentingan.

1. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan hubungan internasional modern, komunikasi politik telah menjadi instrumen strategis dalam membentuk legitimasi, citra, dan pengaruh aktor politik di tengah dinamika keamanan global. Konflik internasional, perang, dan krisis kemanusiaan tidak lagi hanya dipahami melalui pendekatan militer dan diplomasi tradisional, tetapi juga melalui produksi narasi politik yang disebarluaskan oleh media massa dan media digital. Kajian menunjukkan bahwa narasi hero-villain dalam diskursus keamanan digunakan untuk membangun persepsi publik mengenai siapa yang dianggap sebagai pelindung, ancaman, maupun korban dalam konflik internasional. Narasi tersebut menjadi alat penting dalam

memperoleh legitimasi politik dan dukungan terhadap kebijakan keamanan suatu negara (Homolar, 2022).

Dalam komunikasi politik, heroisme sering dikonstruksi melalui tindakan simbolik aktor politik yang tampil di wilayah konflik, area bencana, maupun situasi berisiko tinggi. Kehadiran pemimpin politik di tengah ancaman keamanan dipresentasikan sebagai bentuk keberanian, pengorbanan, dan kepemimpinan yang kuat. Media memiliki peran besar dalam membingkai tindakan tersebut melalui visual, simbol, dan pemberitaan yang membentuk opini publik secara luas. Penelitian mengenai komunikasi politik digital menunjukkan bahwa media dan platform daring tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai arena pembentukan identitas politik, emosi kolektif, serta legitimasi kepemimpinan melalui strategi pencitraan yang terstruktur (Bidewell et al., 2026).

Selain itu, perkembangan media global dan media sosial mempercepat penyebaran konstruksi heroisme politik lintas negara. Dalam perspektif keamanan hubungan internasional, citra heroik dapat menjadi instrumen soft power untuk meningkatkan pengaruh internasional suatu negara maupun aktor politik tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa keamanan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan aktor politik dalam membentuk persepsi publik global. Kajian dalam keamanan internasional menjelaskan bahwa simbol, ikon politik, dan representasi identitas memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas politik, kohesi sosial, serta konstruksi keamanan suatu negara (Steele & Subotić, 2024).

Di sisi lain, media memainkan peran sentral dalam membangun narasi tersebut melalui proses framing. Framing media tidak hanya menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik, tetapi juga bagaimana aktor politik dikonstruksikan sebagai pahlawan, korban, maupun pihak yang harus disalahkan dalam suatu peristiwa. Penelitian mengenai narrative media framing menunjukkan bahwa media secara aktif membangun struktur cerita yang menempatkan tokoh tertentu sebagai hero, victim, atau villain untuk memengaruhi interpretasi publik terhadap realitas politik dan sosial (Frermann et al., 2023).

Namun demikian, konstruksi heroisme politik juga menimbulkan persoalan kritis. Narasi heroik dapat digunakan sebagai alat propaganda untuk melegitimasi tindakan politik kontroversial, memperkuat nasionalisme berlebihan, bahkan memanipulasi persepsi publik terhadap realitas konflik. Dalam banyak kasus, media tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat dalam produksi legitimasi politik melalui framing tertentu terhadap konflik internasional. Studi terbaru mengenai komunikasi politik menunjukkan bahwa strategi pencitraan heroik dapat digunakan untuk

menutupi persoalan kebijakan substantif dan mengalihkan perhatian publik melalui narasi penyelamat (Pratiwi, 2025).

Oleh karena itu, penelitian mengenai efek heroism dalam komunikasi politik menjadi penting untuk memahami hubungan antara media, keamanan internasional, dan konstruksi kekuasaan dalam politik global kontemporer. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana heroisme dalam komunikasi politik digunakan untuk membangun citra aktor politik melalui insiden berisiko tinggi di wilayah konflik kepentingan serta dampaknya terhadap legitimasi politik dan keamanan hubungan internasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan kekuasaan, kebijakan publik, dan aktivitas politik yang melibatkan aktor politik, media, serta masyarakat. Menurut McNair (2018), komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi politik, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan opini publik dan legitimasi kekuasaan. Dalam konteks hubungan internasional, komunikasi politik menjadi semakin penting karena memungkinkan negara maupun pemimpin politik memengaruhi persepsi publik domestik dan internasional melalui berbagai saluran media.

Perkembangan teknologi digital memperluas ruang komunikasi politik sehingga proses pembentukan citra politik tidak lagi bergantung pada media konvensional. Aktor politik dapat secara langsung menyampaikan narasi dan simbol politik kepada masyarakat melalui media sosial dan platform digital. Oleh karena itu, komunikasi politik modern tidak hanya berorientasi pada penyampaian pesan, tetapi juga pada penciptaan makna, emosi, dan identitas politik yang mendukung tujuan strategis aktor politik (McNair, 2018).

Teori Framing Media

Teori framing menjelaskan bagaimana media memilih, menonjolkan, dan mengorganisasi informasi sehingga membentuk cara publik memahami suatu peristiwa. Entman (1993) menjelaskan bahwa framing dilakukan dengan memilih aspek tertentu dari realitas dan menjadikannya lebih menonjol dalam teks komunikasi untuk mempromosikan definisi masalah, interpretasi penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi solusi.

Dalam kasus insiden berisiko tinggi di wilayah konflik, media dapat membingkai seorang aktor politik sebagai pahlawan (hero), korban (victim), atau bahkan ancaman (villain). Framing tersebut memengaruhi persepsi publik terhadap tindakan dan karakter

aktor politik yang terlibat. Melalui visualisasi, pemilihan narasi, dan pengulangan pesan tertentu, media memiliki kemampuan untuk membentuk citra politik yang dapat meningkatkan atau menurunkan legitimasi seorang pemimpin di mata publik.

Konsep Heroisme dalam Komunikasi Politik

Heroisme dalam komunikasi politik merujuk pada konstruksi citra individu sebagai sosok pemberani, pelindung, dan pengambil risiko demi kepentingan publik. Menurut Allison dan Goethals (2014), heroisme merupakan konstruksi sosial yang dibangun melalui narasi, simbol, dan pengakuan masyarakat terhadap tindakan yang dianggap luar biasa. Dalam politik modern, heroisme sering kali dikaitkan dengan pemimpin yang tampil di tengah krisis, konflik, atau situasi berbahaya.

Konstruksi heroisme menjadi semakin kuat ketika tindakan politik tersebut mendapat eksposur media yang luas. Kehadiran seorang pemimpin di wilayah perang, daerah bencana, atau lokasi konflik dapat dipersepsikan sebagai bentuk keberanian dan kepemimpinan yang efektif. Akibatnya, publik cenderung memberikan dukungan politik yang lebih besar kepada aktor yang dipersepsikan memiliki karakter heroik (Allison & Goethals, 2014).

Teori Soft Power dan Legitimasi Politik

Konsep soft power yang diperkenalkan oleh Nye (2011) menjelaskan bahwa pengaruh politik tidak hanya diperoleh melalui kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga melalui daya tarik simbolik, nilai, budaya, dan citra positif. Dalam konteks komunikasi politik, heroisme dapat menjadi instrumen soft power yang memperkuat legitimasi politik seorang pemimpin maupun negara.

Legitimasi politik muncul ketika masyarakat menerima dan mengakui kewenangan aktor politik sebagai sesuatu yang sah. Menurut Beetham (2013), legitimasi terbentuk melalui kombinasi legalitas, justifikasi normatif, dan persetujuan publik. Oleh karena itu, citra heroik yang dibangun melalui media dapat menjadi sumber legitimasi tambahan karena mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan politik.

3. METODE PENELITIAN

B Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena heroisme dalam komunikasi politik serta implikasinya terhadap dinamika keamanan internasional melalui berbagai sumber akademik yang relevan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji makna, konstruksi sosial, dan hubungan antarkonsep yang berkaitan dengan heroisme politik, media, legitimasi kekuasaan, serta

keamanan internasional secara mendalam (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian kepustakaan juga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai fenomena sosial melalui analisis berbagai sumber tertulis yang telah tersedia (Zed, 2018).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, seperti artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan lembaga internasional, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan komunikasi politik, hubungan internasional, sekuritisasi, diplomasi publik, dan media digital. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi topik, kredibilitas akademik, serta keterbaruan publikasi untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan data sekunder dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang luas dan mendalam dari berbagai perspektif ilmiah yang telah teruji sebelumnya (Johnston, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai publikasi ilmiah yang diperoleh dari basis data akademik, seperti Google Scholar, Scopus, Taylor & Francis, Sage Journals, Springer, dan ScienceDirect. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti political heroism, political communication, securitization, international security, media framing, public diplomacy, dan information warfare. Seluruh sumber yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian tema dan fokus penelitian. Studi dokumentasi merupakan teknik yang efektif dalam penelitian kepustakaan karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai sumber informasi yang relevan secara sistematis (Bowen, 2009).

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan berbagai konsep serta temuan yang terdapat dalam literatur yang dikaji. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dipilih disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema utama, seperti konstruksi heroisme politik, peran media dalam pembentukan citra politik, sekuritisasi, legitimasi kekuasaan, serta dampaknya terhadap keamanan internasional. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola hubungan dan argumentasi yang ditemukan dalam berbagai sumber literatur. Tahapan analisis tersebut sejalan dengan model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014).

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pendapat, teori, dan hasil penelitian dari sumber yang berbeda. Triangulasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan keakuratan temuan penelitian melalui proses verifikasi antar sumber data yang relevan (Patton, 2015). Melalui proses tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai peran heroisme dalam komunikasi politik serta pengaruhnya terhadap pembentukan opini publik, legitimasi politik, dan dinamika keamanan internasional pada era digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

B Fenomena heroisme dalam komunikasi politik merupakan salah satu strategi pembentukan citra yang digunakan oleh aktor politik untuk memperoleh legitimasi dan dukungan publik, terutama pada situasi krisis maupun konflik internasional. Dalam kajian hubungan internasional, heroisme tidak hanya dipahami sebagai upaya membangun popularitas individu, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam memperkuat pengaruh politik dan menjaga stabilitas melalui penggunaan simbol, narasi, dan representasi tertentu. Menurut Nye (2004), kekuatan negara tidak hanya berasal dari kapasitas militer (hard power), tetapi juga dari kemampuan membentuk persepsi publik melalui soft power dan diplomasi publik. Oleh karena itu, citra kepahlawanan seorang pemimpin dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan legitimasi politik di tingkat domestik sekaligus memperkuat posisi negara dalam lingkungan internasional.

Perkembangan media massa dan media digital telah memperluas ruang produksi heroisme politik. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan penyebaran pesan politik secara cepat dan masif sehingga berpengaruh terhadap pembentukan opini publik. Castells (2009) menjelaskan bahwa masyarakat kontemporer berada dalam struktur network society yang menjadikan informasi sebagai sumber utama kekuasaan. Dalam situasi konflik, media sering menampilkan aktor politik sebagai figur yang berani, tegas, dan mampu melindungi masyarakat. Representasi tersebut membentuk persepsi heroik yang berpotensi meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemimpin politik.

Selain berfungsi sebagai sarana pencitraan, heroisme politik juga memiliki hubungan erat dengan isu keamanan internasional. Teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998) menjelaskan bahwa ancaman keamanan tidak selalu bersifat objektif, tetapi dapat dikonstruksi melalui komunikasi politik. Dalam konteks ini, narasi heroik digunakan untuk memperkuat legitimasi berbagai kebijakan keamanan negara,

termasuk kebijakan militer maupun intervensi politik. Aktor politik yang diposisikan sebagai pelindung bangsa cenderung memperoleh dukungan yang lebih besar terhadap kebijakan yang mereka ambil. Dengan demikian, heroisme dapat dipahami sebagai bagian dari strategi sekuritisasi yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap ancaman keamanan.

Meskipun demikian, penggunaan narasi heroik juga memiliki sejumlah konsekuensi negatif. Chomsky dan Herman (1988) berpendapat bahwa media dapat berfungsi sebagai instrumen propaganda yang mendukung kepentingan elite politik. Dalam praktiknya, citra kepahlawanan sering kali digunakan untuk mengurangi ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ketika seorang pemimpin dipersepsikan sebagai figur penyelamat, masyarakat cenderung lebih mudah menerima kebijakan yang kontroversial. Kondisi ini berpotensi mendorong berkembangnya nasionalisme yang berlebihan, memperkuat rivalitas antarnegara, serta meningkatkan risiko konflik internasional.

Heroisme politik juga berperan dalam pembentukan identitas nasional. Campbell (1998) menegaskan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan ancaman fisik, tetapi juga proses pembentukan identitas melalui representasi politik. Dalam konteks tersebut, figur heroik digunakan untuk membangun solidaritas nasional sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan luar negeri. Melalui konstruksi identitas sebagai pelindung bangsa, pemimpin politik memperoleh dukungan yang lebih besar dalam menjalankan agenda politik domestik maupun internasional.

Pada era globalisasi media, konstruksi heroisme semakin terhubung dengan dinamika keamanan internasional. Homolar menjelaskan bahwa narasi hero dan villain sering digunakan dalam diskursus keamanan untuk membedakan pihak yang dianggap sebagai pelindung dan pihak yang dipersepsikan sebagai ancaman. Narasi semacam ini efektif karena mampu membangun emosi kolektif masyarakat melalui cerita mengenai ancaman, perjuangan, dan kemenangan. Akibatnya, masyarakat lebih mudah menerima berbagai kebijakan keamanan yang diajukan oleh pemerintah.

Dalam perspektif sekuritisasi, keberhasilan konstruksi ancaman sangat bergantung pada kemampuan aktor politik mengelola komunikasi publik. Williams menegaskan bahwa simbol, visual, dan representasi media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai ancaman keamanan. Oleh karena itu, kehadiran seorang pemimpin di wilayah konflik atau situasi berisiko tinggi sering dimaknai sebagai simbol keberanian dan kepemimpinan yang kemudian memperkuat legitimasi politiknya.

Perkembangan media digital semakin memperkuat proses tersebut. Walsh dan Barbara menunjukkan bahwa media siber memungkinkan negara maupun elite politik memobilisasi dukungan publik melalui penyebaran narasi keamanan dan visual konflik. Berbagai gambar, video, dan konten digital mampu menciptakan respons emosional yang kuat sehingga meningkatkan efektivitas pembentukan citra heroik. Dalam konteks ini, media digital tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga instrumen strategis dalam pengelolaan opini publik.

Framing media turut berperan penting dalam proses konstruksi heroisme. Vultee menjelaskan bahwa media dapat membingkai suatu isu sebagai ancaman luar biasa yang memerlukan tindakan khusus dari negara. Melalui proses framing tersebut, pemimpin politik sering diposisikan sebagai pelindung masyarakat yang mampu menghadapi berbagai ancaman keamanan. Akibatnya, publik cenderung memberikan legitimasi yang lebih besar terhadap kebijakan keamanan yang diambil pemerintah.

Selain melalui narasi, heroisme politik juga dibangun melalui kekuatan visual. Hansen menjelaskan bahwa representasi visual memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi ancaman maupun perlindungan secara cepat. Foto atau video yang menampilkan pemimpin di lokasi bencana, wilayah konflik, atau bersama aparat keamanan sering digunakan untuk memperkuat citra keberanian dan kepemimpinan. Reproduksi visual semacam ini oleh media turut memperkuat legitimasi politik aktor yang bersangkutan.

Namun, heroisme politik juga dapat dimanfaatkan sebagai bentuk manipulasi komunikasi publik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa narasi penyelamat (savior narrative) sering digunakan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan kebijakan yang menuai kritik. Melalui media sosial, figur politik diposisikan sebagai solusi atas berbagai permasalahan publik meskipun tidak selalu disertai perubahan kebijakan yang substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa heroisme politik pada era digital sering kali bersifat performatif dan berorientasi pada pencitraan.

Dalam konteks hubungan internasional, heroisme juga berkaitan dengan strategi diplomasi dan persaingan pengaruh global. Negara kerap membangun identitas sebagai pelindung demokrasi, penjaga perdamaian, atau penyelamat kemanusiaan guna memperoleh dukungan internasional terhadap kebijakan luar negeri mereka. Dengan demikian, heroisme tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi politik domestik, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi publik dalam membangun citra negara di tingkat global.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa heroisme politik semakin terintegrasi dengan strategi keamanan dan perang informasi. Fenomena seperti Wolf Warrior Diplomacy

memperlihatkan bagaimana narasi kepahlawanan nasional digunakan untuk memperkuat legitimasi politik dan identitas nasional melalui media digital. Pada saat yang sama, perkembangan information warfare menunjukkan bahwa komunikasi politik modern tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada upaya memengaruhi persepsi, emosi, dan cara berpikir masyarakat.

Secara keseluruhan, heroisme dalam komunikasi politik merupakan instrumen strategis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan opini publik, legitimasi kekuasaan, identitas nasional, dan dinamika keamanan internasional. Heroisme dapat menjadi sarana efektif untuk membangun dukungan politik dan memperkuat posisi negara. Namun, penggunaan narasi heroik juga berpotensi menimbulkan propaganda, manipulasi opini publik, dan eskalasi konflik apabila dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan politik tertentu. Oleh karena itu, kajian mengenai heroisme politik perlu dilakukan secara kritis agar hubungan antara media, kekuasaan, dan keamanan global dapat dipahami secara lebih komprehensif dalam studi hubungan internasional kontemporer.

Fenomena heroisme politik pada era digital juga tidak dapat dilepaskan dari munculnya politik personalisasi (*personalized politics*), yaitu kecenderungan komunikasi politik yang berpusat pada figur individu dibandingkan institusi. Dalam kondisi ini, keberhasilan kebijakan sering dikaitkan secara langsung dengan kemampuan dan karakter pemimpin, sementara kegagalan cenderung dipisahkan dari citra personal yang telah dibangun. Media sosial memperkuat fenomena tersebut melalui penyebaran konten yang menonjolkan aktivitas, kedekatan, dan kepemimpinan figur politik secara berkelanjutan. Akibatnya, masyarakat lebih mudah membangun ikatan emosional dengan individu pemimpin daripada memahami substansi kebijakan yang dijalankan. Dalam perspektif hubungan internasional, personalisasi politik berpotensi memengaruhi arah kebijakan luar negeri karena keputusan strategis negara sering kali dinilai berdasarkan citra dan popularitas pemimpin yang sedang berkuasa.

Selain itu, konstruksi heroisme politik memiliki dampak terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi publik. Ketika figur politik diposisikan sebagai pahlawan yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan nasional, ruang deliberasi dan kritik publik berpotensi mengalami penyempitan. Masyarakat cenderung memandang kritik terhadap pemimpin sebagai bentuk penolakan terhadap kepentingan nasional, sehingga polarisasi politik semakin meningkat. Dalam konteks keamanan internasional, kondisi ini dapat mempermudah pemerintah memperoleh dukungan terhadap kebijakan luar negeri atau kebijakan keamanan yang bersifat kontroversial. Oleh karena itu, literasi media dan

kemampuan berpikir kritis menjadi aspek penting dalam menghadapi berbagai narasi heroisme politik. Masyarakat perlu memahami bahwa citra kepahlawanan yang ditampilkan melalui media tidak selalu mencerminkan efektivitas kebijakan secara nyata, melainkan dapat menjadi bagian dari strategi komunikasi untuk membangun legitimasi dan dukungan politik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena heroisme dalam komunikasi politik menjadi strategi penting untuk membangun legitimasi, memperoleh dukungan publik, dan memperkuat posisi aktor politik. Melalui media massa dan media digital, heroisme dikonstruksikan melalui narasi, simbol, dan framing yang menggambarkan aktor politik sebagai pelindung atau pemimpin yang mampu menghadapi ancaman. Kajian ini menunjukkan bahwa heroisme berkaitan erat dengan sekuritisasi, diplomasi publik, pembentukan identitas nasional, dan perang informasi dalam hubungan internasional. Narasi heroik dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat citra negara, namun juga berpotensi digunakan sebagai instrumen propaganda yang memengaruhi persepsi masyarakat dan mengurangi ruang kritik terhadap kebijakan kontroversial. Di era digital, penyebaran narasi heroisme semakin cepat dan luas sehingga berpengaruh terhadap opini publik, legitimasi politik, dan dinamika keamanan internasional.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan peningkatan literasi media dan literasi digital agar masyarakat mampu memahami serta mengevaluasi narasi heroisme politik secara kritis. Pemerintah dan aktor politik juga perlu mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan substansi kebijakan dibandingkan sekadar membangun citra heroik. Selain itu, penggunaan narasi heroisme dan keamanan harus dilakukan secara proporsional agar tidak memicu polarisasi sosial maupun konflik. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, seperti studi kasus atau analisis media, untuk mengkaji pengaruh heroisme politik terhadap persepsi publik dan kebijakan keamanan di era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Allison, S. T., & Goethals, G. R. (2014). *Heroic leadership: An influence taxonomy of 100 exceptional individuals*. Routledge.
- Beetham, D. (2013). *The legitimation of power* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Bidewell, T., Deligianni, A., Elmas, T., Llewellyn, C., & Ross, B. (2026). Gendered communication patterns of political elites on Truth Social. *Political Communication Studies*.

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Campbell, D. (1998). *Writing security: United States foreign policy and the politics of identity* (Revised ed.). University of Minnesota Press.
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- Chomsky, N., & Herman, E. S. (1988). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media*. Pantheon Books.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Frermann, L., Li, J., Khanehzar, S., & Mikolajczak, G. (2023). Conflicts, villains, resolutions: Towards models of narrative media framing. *Proceedings of the Computational Communication Research Conference*.
- Homolar, A. (2022). A call to arms: Hero–villain narratives in US security discourse. *Security Dialogue*, 53(4), 324–341. <https://doi.org/10.1177/09670106211005897>
- Johnston, M. P. (2014). Secondary data analysis: A method of which the time has come. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries*, 3(3), 619–626.
- McNair, B. (2018). *An introduction to political communication* (6th ed.). Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Nye, J. S. (2021). *Soft power: The means to success in world politics* (Updated ed.). PublicAffairs.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Pratiwi, A. (2025). Analyzing fake heroism in Indonesian government communication strategies amid controversial policies. *Cakra Communico: Journal of Communication Science*, 2(2), 115–129.
- Steele, B. J., & Subotić, J. (2024). Icons and ontological (in)security. *European Journal of International Security*, 9(2), 141–158. <https://doi.org/10.1017/eis.2023.22>
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.